



Pedagang Malioboro Wadul Komnas HAM

Cari Solusi sebelum Relokasi dari TM 2

JOGJA - Perwakilan pedagang Teras Malioboro (TM) 2 mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI. Mereka mengadakan kondisi faktual dalam proses relokasi pedagang jilid kedua oleh Pemprov DJJ maupun Pemkot DJJ.

Rakha Ramadhan, staf Divisi Advokasi LBH Jogjakarta dan pendamping hukum PKL Malioboro, mengungkapkan, audiensi dengan Komnas HAM tersebut berlangsung Kamis (24/10). Pedagang telah menyampaikan beberapa usul kepada mereka.

"Namun, hingga hari ini (kemarin, Red), belum terwujud. Sebagai tindak lanjut, Komnas HAM bakal menerbitkan surat perlindungan kepada para pedagang atas adanya represi dan dugaan kriminalisasi. Masih dalam proses. Mereka bilang secepatnya," kata Rakha kepada Jawa Pos Radar Jogja kemarin (27/10).

Selain itu, Komnas HAM akan meninjau laporan para pedagang. Mereka bermaksud menjeda dahulu



LAPOR: Perwakilan pedagang Teras Malioboro diterima komisioner Komnas HAM, Kamis (24/10).

proses relokasi dan memfasilitasi musyawarah antara pedagang dan pemangku kebijakan.

Pemprov dan pemkot telah lalai dalam melindungi, menghormati, dan memajukan hak pedagang selaku rakyat terdampak kebijakan. Beberapa kendala yang dialami pedagang, antara lain, menurunnya pendapatan dan adanya intimidasi. Kami telah sampaikan semuanya kepada Komnas HAM," ungkapnya.

Dia melanjutkan, Komnas HAM yang diwakili salah seorang komisionernya, Hari Kurniawan, menilai partisipasi masyarakat itu sangat perlu ditanggapi. Menurut dia, Pemkot Jogja tidak boleh memecah belah pedagang. Relokasi tanpa

partisipasi pedagang berarti melanggar hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Ketua Paguyuban Tri Dharma Supriyati menambahkan, PKL Teras Malioboro sebagai rakyat kecil terimpit di tengah dua kebijakan raksasa. Yakni, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur-Jogjakarta-Prambanan dan World Intangible Heritage UNESCO. Dia menegaskan, program tersebut berdampak pada penyingkiran hak-hak pedagang.

"Poin-poin itulah yang melatarbelakangi PKL Malioboro mengadu ke Komnas HAM. Diharapkan, mereka bisa menjadi institusi yang melindungi dan memajukan hak-hak para pedagang," ujarnya. (oso/dri)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005